

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA  
KAMERA DIGITAL DI MYCAM\_MADIUN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi  
Strata 1 Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MAY CENDY ANINDITYA WILIS PUTRI**

**C 100 150 206**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN SEWA – MENYEWA KAMERA  
DIGITAL DI MYCAM\_MADIUN

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH :

MAY CENDY ANINDITYA WILIS PUTRI

C100150206

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Nuswardhani, S.H., S.U.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA**  
**DIGITAL DI MYCAM\_MADIUN**

Oleh :

**MAY CENDY ANINDITYA WILIS PUTRI**

**C100150206**

Telah diterima dan disahkan di Depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari , 13 Desember 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.H.)  
NIK.537 / NIDN.0727085803

### **PERNYATAAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu hari nanti karya tulis ini mengandung plagiat, maka penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 November 2018

Penulis,



**May Cendy Aninditya Wilis Putri**

NIM. C 100 150 206

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA KAMERA DIGITAL DI MYCAM\_MADIUN**

### **Abstrak**

Perangkat elektronik pada era ini , khususnya kamera digital sangat menarik perhatian dan berkembang pesat di kehidupan manusia. Dengan adanya kamera digital mampu mengabadikan setiap momen penting dan bersejarah dalam kegiatan manusia. Dengan harga kamera digital yang tinggi, banyak masyarakat lebih memilih menikmati setiap kegunaan kamera dengan menyewa di persewaan kamera digital. Maka sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun, peraturan yang berlaku dan hak kewajiban kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam-madiun. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yang mana akan meneliti setiap peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kamera digital. Hasil penelitian ini memaparkan mengenai proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah memenuhi hal tersebut, pihak penyewa wajib mengisi formulir yang berisi ketentuan yang sudah disediakan oleh pihak yang menyewakan, dan harus menandatangani akta tersebut sebagai bentuk persetujuan. Penandatanganan tersebut berarti terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut, lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan kaera digital di mycam\_madiun. Maka dari itu, kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik – baiknya, jika tidak maka akan ada tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum terjadi ketika salah satu pihak melakukan kesalahan, atas dasar wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPdata dan perbuatan melawan hukum yag terdapat dalam pasal 1365 KUHPdata.

**Kata kunci :** Kamera Digital, Sewa menyewa, Tanggung Jawab Hukum.

### **Abstract**

Electronic devices in this era, especially digital cameras are very interesting and growing rapidly in human life. With the existence of a digital camera capable of capturing every important and historic moment in human activities. With the high price of digital cameras, many people prefer to enjoy every use of the camera by renting in digital camera rentals. So because of that, this study aims to find out the process of leasing agreements - renting digital cameras on mycam\_madiun, the applicable regulations and the obligations of both parties, as well as legal responsibility if one party makes a mistake in the lease agreement to rent a digital camera on mycam\_madiun. This research is a type of descriptive research, which will explain legal responsibility in the lease agreement to lease a digital camera on mycam-madiun. This research approach is a normative approach, which will examine every existing regulation relating to leasing agreements for digital cameras.

The results of this study describe the lease agreement process - renting a digital camera at mycam\_madiun must meet administrative requirements and legal requirements. After fulfilling this, the tenant must fill out a form that contains the provisions that have been provided by the leasing party, and must sign the deed as a form of agreement. The signing meant an agreement was reached between the two parties. From the agreement, a legal relationship was born which gave rise to rights and obligations for the tenants and parties who rented digital shirts on mycam\_madiun. Therefore, both parties must carry out their obligations as well as possible, otherwise there will be legal liability. Legal liability occurs when one of the parties makes a mistake, on the basis of the default contained in article 1243 of the Civil Code and acts against the law contained in article 1365 of the Civil Code.

**Keywords:** Digital Cameras, Leasing, Legal Responsibility.

## 1. PENDAHULUAN

Perangkat elektronik pada era ini sangat berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Misalnya alat fotografi , yakni kamera digital dalam mengabadikan momen penting dan bersejarah dalam kehidupan manusia.

Kamera digital merupakan alat perangkat elektronik yang dapat merekam dan menghasilkan foto suatu obyek gambar. Keberadaan kamera digital mampu memikat masyarakat untuk melakukan sewa – menyewa kamera digital, dari pada membeli kamera dengan harga yang tinggi.

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi Sewa – menyewa ialah Perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri kepada pihak lainnya untuk memberikan kepadanya kenikmatan dari suatu benda selama waktu tertentu yang disetujui pihak lain itu. Jadi ada tiga unsur, yakni benda, harga dan waktu. Dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital diperlukan suatu kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu. Setelah adanya kesepakatan maka timbullah hubungan hukum yang melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak, yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, dan melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut harus melaksanakan suatu tanggung jawab hukum.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Maka dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun menggunakan perjanjian tertulis dan merupakan perjanjian baku. Dimana perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa cukup mengisi butir normatif. Dan jika pihak penyewa menyetujui maka dilakukan penandatanganan untuk akta perjanjian tersebut. Sehingga jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang ada pada akta tersebut dan melakukan kesalahan yang berdasar wanprestasi serta perbuatan melawan hukum, maka dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun antara kedua belah pihak? (2) Bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta peraturan di persewaan kamera digital di mycam\_madiun ? (3) Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun antara kedua belah pihak. (2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, serta peraturan persewaan kamera digital di mycam\_madiun. (3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun.

Manfaat yang diharapkan adalah (1) Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun nyata dalam lingkungan masyarakat. (2) Mampu memberi masukan khususnya dalam pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kamera digital. (3) Diharapkan berguna bagi masyarakat agar masyarakat memahami proses hukum dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum serta asas hukum dalam akta perjanjian persewaan kamera digital. Kemudian jenis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perjanjian persewaan kamera digital . Penelitian ini dilakukan di toko persewaan kamera digital di mycam\_madiun, sumber data yang digunakan adalah (1) Penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh Data sekunder, yang didapatkan dengan menggunakan (a) Bahan hukum primer yakni yang didapatkan dari KUHPerdara , (b) Bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku, dokumen, jurnal yang berisikan tanggung jawab hukum atas suatu perjanjian sewa menyewa serta ruang lingkup lainnya yang relevan dengan perjanjian sewa menyewa kamera digital, serta akta perjanjian pada perjanjian sewa menyewa kamera digital dimycam-madiun. (2) Penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yang didapatkan dengan menentukan (a) Lokasi penelitian yakni di Toko Kamera Digital Mycam\_Madiun di Madiun. (2) Subyek Penelitian yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan pada perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah (a) Studi kepustakaan (b) Penelitian Lapangan berupa menyusun daftar pertanyaan dan melakukan wawancara. Penganalisaan dari data sekunder dan data primer yang terkumpul menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kamera Digital di Mycam\_madiun**

Perjanjian sewa menyewa dalam pasal 1548 Kitab undang – undang hukum perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan



dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun diawali dengan syarat administrasi dan syarat hukum.

Adapun syarat administrasi adalah syarat yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dan harus diisi oleh pihak penyewa, yakni sebagai berikut: (1) Nama, (2) Alamat, (3) No.Handphone, (4) Jenis obyek yang disewa dan (5) Jangka waktu menyewa.

Sedangkan syarat hukum yakni terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah nya perjanjian meliputi (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu Sebab yang halal.

Apabila pihak penyewa telah memahami dan menyetujui mengenai syarat administrasi dan syarat hukumnya, maka pihak penyewa harus menandatangani akta perjanjian tersebut sebagai bentuk kesepakatan. Setelah Kesepakatan tersebut timbullah hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Dari hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut harus melakukan suatu tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain atas kesalahannya.

### **3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Sewa – Menyewa Kamera Digital di Mycam\_madiun**

Peraturan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun adalah harus memenuhi syarat sah nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Sebab (causa) yang halal.

Selain itu ketentuan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian sewa - menyewakamera digital di mycam\_madiun terdapat dalam akta perjanjian, yakni merupakan : (1) Peraturan mengenai biaya sewa per 24 jam, (2) Pengembalian barang sewa harus sesuai dengan jangka waktu pada kesepakatan persewaan , sehingga jika melampaui batas waktu maka akan dibebankan tambahan biaya atau dianggap untuk dihitung menyewa hari selanjutnya. (3) Pertanggung jawaban pihak penyewa jika terjadi suatu kerusakan, kehilangan maupun hal lain pada kamera digital yang disewakan selama masa sewa masih berjalan. (4) Wajib untuk meninggalkan kartu identitas seperti KTP atau kartu pelajar sebagai jaminan.

Adapun mengenai hak dari pihak yang menyewakan antara lain : Memperoleh biaya dari hasil persewaan kamera digital yang disewa oleh pihak penyewa , dan Saat pihak penyewewa mengembalikan barang, pihak yang menyewakan berhak memperoleh kondisi kamera digital dalam keadaan baik seperti saat penyerahan barang kepada pihak penyewa.

Kemudian Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menyewakan adalah : (1) Menyerahkan kamera digital kepada si penyewa saat terjadinya perjanjian. (2) Memelihara kamera digital dengan sebaik-baiknya hingga layak untuk menjadi obyek yang disewakan. (3) Memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada pihak penyewa untuk menikmati kamera digital sesuai jangka waktu perjanjian sewa menyewa.

Sedangkan Hak dari pihak penyewa adalah : (1) Memperoleh fasilitas kamera digital sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Memperoleh kamera digital yang ia sewa dengan kondisi yang layak. Kewajiban dari pihak penyewa adalah : (1) Menggunakan kamera digital dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa kamera digital di Mycam\_madiun. (2) Membayar harga sewa kamera digital sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

### **3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan**

Tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun timbul ketika salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Seperti dalam Perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun yakni pihak penyewa melakukan pengrusakkan dan menghilangkan kamera digital yang ia sewa, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang menyewakan. Maka dengan adanya kesalahan tersebut, pihak penyewa yang menyebabkan suatu kerugian yang diderita pihak yang menyewakan, maka pihak penyewa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian atas dasar wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”* dan Perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera digital di mycam\_madiun, pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus memenuhi semua syarat dan peraturan mulai dari sebelum terjadinya kesepakatan hingga terjadinya kesepakatan. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. lalu jika penyewa setuju maka diperlukan penandatanganan akta perjanjian, yang berarti kesepakatan tersebut telah terjadi. Dengan adanya kesepakatan maka lahirlah hubungan

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

*Kedua*, Peraturan dalam pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan dalam akta perjanjian harus dipenuhi kedua belah pihak, begitu juga dengan hak kewajiban antara penyewa dan pihak yang menyewakan. Kedua nya harus melaksanakan dengan sebaik baik nya sesuai porsi masing – masing pihak.

*Ketiga*, Mengenai pertanggung jawaban hukum, apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut harus mengganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata mengenai wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum.

#### **4.2 Saran**

Pertama , Bagi Pihak Yang Menyewakan Kamera Digital di Mycam\_Madiun. Ketentuan dalam akta perjanjian perlu ditambahkan mengenai syarat atau batas minimal usia pihak penyewa. Karena dalam syarat sah nya perjanjian, cakap meliputi berakal sehat dan usia nya minimal 18 tahun. Karena ditakutkan, jika pihak penyewa kurang dari usia 18 tahun, dan ia menyebabkan suatu kerugian, akan sulit untuk diproses karena tidak cakap dalam pandangan hukum. Sehingga hal tersebut tentu menjadi persoalan yang rumit bagi pihak yang menyewakan kamera digital di mycam\_madiun.

Kedua , Bagi Pihak Penyewa Kamera Digital di Mycam\_Madiun Dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa kamera digital di mycam\_madiun, syarat serta ketentuan dalam akta perjanjian dibuat sepihak oleh pihak yang menyewakan. Maka sebaiknya sebelum menandatangani akta perjanjian tersebut, pihak penyewa perlu menelaah syarat dan ketentuan tersebut dengan baik terlebih dahulu, ditakutkan ada syarat dan ketentuan yang memberatkan pihak penyewa. Sehingga jika dirasa pihak penyewa setuju, maka cukup untuk menandatangani akta perjanjian tersebut.

Ketiga , Bagi Masyarakat Diharapkan untuk berhati – hati dalam melaksanakan suatu perjanjian sewa – menyewa. Masyarakat harus faham mengenai isi akta perjanjian yang berupa syarat dan ketentuan, karena dari ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga tidak melanggar suatu ketentuan tersebut dalam melaksanakan suatu perjanjian sewa – menyewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nana Lesmana,2013,*Tips Paling Komplet Fotografi*,Jakarta:Grasindo.
- R.M. Suryodiningrat,1982,*Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*,Bandung: Tarsito.
- Gemala Dewi,2004,*Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*,Jakarta:Kencana.
- Satrio,J,1993,*Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Satrio,J,1993,*Hukum Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nana Lesmana,2013,*Tips Paling Komplet Fotografi*,Jakarta:Grasindo.
- Gilang Ardi Setyo Hutomo, Nova Rijati : “*Sistem pendukung keputusan dalam pemilihan tipe kamera action dengan metode simple additive weighting*” (Semarang:DINUS semarang
- Soeroso,R,2005,*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta:Cet.VII Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2015,*Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992,*Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*,Bandung:Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan,2017,*Hukum Perikatan*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Khairanddy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta:Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ishaq, 2017,*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta.

Zainuddin,2017,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta;Sinar Grafika.

R. Subekti,1989,Aneka perjanjian, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.

Prof.Subekti,2005,*Hukum Perjanjian*,Jakarta:Internasa.